KATALOG: 7102025.9107



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN SORONG



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN SORONG 2022

No. Publikasi : 91070.2235

No. Katalog BPS : 7102025.9107

No. ISSN

: 14,8 X 21 cm Ukuran Buku

Jumlah Halaman : vi + 40 Halaman

Penyunting : BPS Kabupaten Sorong

Naskah : BPS Kabupaten Sorong

: BPS Kabupaten Sorong Gambar Kulit

Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Sorong

Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Sorong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN SORONG 2022

Anggota Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Ratna M.H. Gusti, S.E., M.P.

Editor : Rusdiando, S.Si

Penulis : Novelist Friendly Tuharea, S.P

KATA PENGANTAR

Publikasi "Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong 2022" merupakan publikasi yang menyajikan angka dan penjelasan dari IKK Kabupaten Sorong Tahun 2022. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yang berkaitan dengan sektor konstruksi serta sebagai bahan baku untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Sorong, Oktober 2022

Kepala BPS Kabupaten Sorong

Ratna M.H. Gusti, S.E., M.P

DAFTAR ISI

KATA PE	ENGAN	ITAR	iv		
DAFTAR	ISI		٧		
BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang	1		
	1.2	Tujuan	6		
BAB II	KONS	SEP DAN DEFINISI	7		
BAB III	METODOLOGI				
	3.1	Ruang Lingkup dan Sumber Data	17		
	3.2	Metode Penghitungan IKK	17		
	3.3	IKK 2022	26		
BAB IV	ANAL	ISIS IKK KABUPATEN SORONG	29		
5.11	4.1	Profil Kabupaten Sorong	29		
	4.2	IKK Kabupaten Sorong	33		
DAFTAR	PUST	AKA	40		

Hithes: Ilsorond kalo in Paris in Paris

BAB I PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang**

Pembangunan pada suatu daerah diarahkan untuk kemiskinan dan mendorona mengurangi upava peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang di undangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi.

Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu dilandasi pula oleh Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) salah satu sumber ditujukan pendapatan daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang di alokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk di Kelola oleh daerah rangka mendanai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Salah satu bentuk Transfer ke daerah (TKD) tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan merupakan belanja negara yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 sebagaimana telah digantikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Umum merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal yang terjadi antar daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masvarakat.

fiskal Asas kesenjangan (fiscal gap) yang mendasari penghitungan DAU tersebut memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga DAU ke setiap daerah menjadi pembagian proporsional, dan merata. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan DAU disamping jumlah penduduk, luas wilayah, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

IKK sendiri merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data vaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Serentak Harga Barang Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, Upah Jasa Kontruksi dalam rangka penghitungan IKK yang dilakukan setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

itu, bobot/diagram timbang IKK Sementara diperoleh dari Bill of Quantity (BoQ). BoQ merupakan realisasi pembangunan suatu konstruksi dari kabupaten/kota vana bersangkutan. Realisasi pembangunan tersebut berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 (lima) jenis bangunan yang ditentukan.

Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik seperti: bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya IKK untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat kebutuhan akan pentingnya angka IKK sebagai komponen penghitungan DAU maka disusunlah publikasi "Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sorong 2022" ini, dengan harapan bahwa data yang termuat

dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penghitungan DAU, serta bagi masyarakat, akademisi, atau pelaku usaha yang ingin melihat keterbandingan Kabupaten Sorong terhadap daerah-daerah lainnya dalam An bic state of the state of th hal yang berkaitan dengan besaran biaya konstruksi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tuiuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong 2022 ini adalah:

- Memberikan komponen-komponen gambaran penyusun IKK Kabupaten Sorong Tahun 2022;
- 2. Mengetahui berapa nilai IKK Kabupaten Sorong Tahun 2022;
- sebagai 3. Dapat dijadikan salah bahan satu pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Sorong kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
- 4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi starting point bagi Pemerintah Kabupaten Sorong dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sorong pada tahun-tahun yang akan datang; dan
- 5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti, atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Sorong secara lebih spesifik.

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum vana digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang campuran, pedagang besar, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan Indeks Kemahalan Konstruksi.

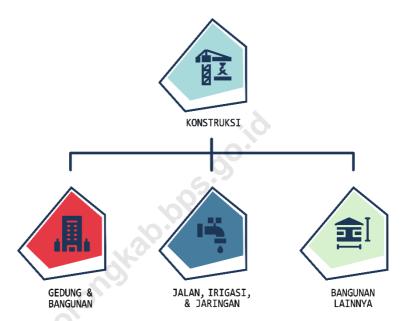
- Harga Perdagangan Besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang.
- 2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang besar/distributor) dalam jumlah besar di pasar pertama atas suatu barang.
- 3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.

- 4. Harga pedagang campuran adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara *party*/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
- 5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/ supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
- **Produsen** adalah penghasil barang-barang yang dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan mesin.
- Pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi dalam jumlah besar (party/grosir).
- 8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga

- yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.
- Party/grosir atau jumlah besar yang dimaksud 9. adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarannya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
- **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan yang 10. hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi pembuatan, perencanaan, persiapan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang disebut *basic heading* yang dapat dilihat seperti berikut:

Gambar 1. Basic Heading



Gedung dan bangunan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

- 1. Gedung dan bangunan untuk tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, *real* estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
- 2. Gedung dan bangunan bukan untuk tempat tinggal meliputi gedung perkantoran, industri, kesehatan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

- 1. Bangunan umum untuk pekerjaan pertanian, terdiri dari:
 - pengairan, yaitu a. Bangunan meliputi pembangunan waduk (reservoir), bendungan (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, yaitu meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, terdiri dari:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.

- meliputi c. Bangunan dermaga, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- 3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi terdiri dari:
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/ penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral komunikasi, meliputi telefon/telegraf, bangunan sentral konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi instalasi air bersih dan air limbah, dan saluran drainase pada gedung.

- Instalasi listrik, meliputi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan tinggi.
- g. Instalasi gas, meliputi pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal, dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan klasifikasi untuk bangunan lainnya terdiri dari bangunan terowongan, sipil lainnya (lapangan bangunan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab, dan kerangka baia, pengerukan, pemasangan konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnva, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk

- peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.
- 11. Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/ organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Harga sewa termasuk biaya sewa alat, jasa operator alat, tetapi tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan bahan bakar.
- 12. **Upah** adalah dan sebagainya uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang.
- 13. Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi representativeness dan asas comparibility vaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau serta mempunyai tingkat

- keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.
- 14. **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau nasional. Kualitas provinsi digunakan secara sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
- **Diagram timbang** atau bobot yang digunakan 15. dalam penghitungan IKK 2022 terdiri dari diagram timbang IKK dengan pendekatan *Basket of* Construction Components Approach (BOCC) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang umum yang digunakan dalam penghitungan IKK 2022 berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi.
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan kemahalan konstruksi tingkat suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional.
- 17. **Bill of Quantity (BoQ)** adalah daftar dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang,

spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga. hites: Ilsorongkab ibps. go.id

BAB III METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2022 adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam bangunan/konstruksi pembuatan suatu di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pendukung, terdapat juga data BoQ yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dinas yang Pekeriaan Umum. BoO digunakan dalam penghitungan IKK 2022 berupa realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis pada tahun 2020 dan 2021.

3.2 Metode Penghitungan IKK

Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKK didasarkan pada paket komoditas yang dipakai sebagai pendekatan dalam merumuskan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK). TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/ konstruksi per satuan

ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Paket komoditas yang dimaksud mencakup barang-barang natural/penggalian, barang-barang hasil industri, serta sewa alat berat dan jasa. Dalam menyusun paket komoditas ini, didasarkan pada asas comparability (keterbandingan), representativeness (keterwakilan), dan trade off comparability vs representativeness.

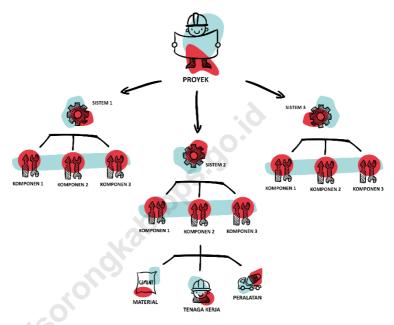
Setelah paket komoditas didapatkan, maka dibutuhkan pula diagram timbang kelompok jenis bangunan. Diagram timbang ini disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan dan jasa dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas (m²) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi.

Diagram timbang ini juga diperlukan pembentukan TKK setiap jenis barang. Data-data dalam diagram timbang ini didapatkan dari BoQ dari berbagai pihak yang telah melaksanakan proyek konstruksi sepanjang tahun 2020 dan 2021. Kemudian untuk melengkapi komponen di atas diperlukan pula data harga bahan bangunan dan tarif sewa alat berat yang dikumpulkan melalui survei serentak yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Sorong.

Diagram timbang pada IKK 2022 menggunakan pendekatan Basket of Construction Components (BOCC) yang didesain dengan tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan dalam IKK 2022 ini terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

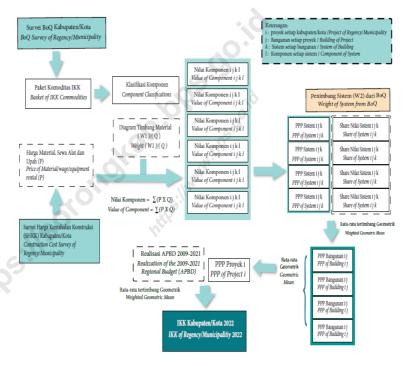
Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode BoQ.

Gambar 2. Hubungan antara proyek, sistem dan komponen



Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, serta koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian kedalam beberapa dibagi kembali item pekerjaan konstruksi. Setelah diperoleh komponen-komponen penyusun IKK diatas maka dapat dilakukan penghitungan berdasarkan formula dengan alur seperti dibawah ini.

Gambar 3.
Proses Penghitungan IKK secara Keseluruhan beserta
Penggunaan Penimbang



Dalam proses penghitungan IKK menggunakan 3 (tiga) penimbang yaitu w1, w2 dan w3. Penimbang pertama (w1) yakni Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan barang modal bangunan yang digunakan untuk menghitung IKK dari PPP

proyek. Penimbang kedua (w2) yakni data dari Bill of Quantity (BoQ) dari kegiatan proyek yang sudah selesai (bukan RAB). Penimbang ini digunakan untuk menghitung PPP jenis bangunan dari PPP sistem. Penimbang ketiga (w3) yakni dari data Buku Analisa Harga satuan pekerjaan kementrian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2016 (perubahan atas Peraturan Menteri Tahun 2013) yang digunakan untuk menghitung nilai komponen dari harga material dan upah jasa kontruksi.

Penghitungan IKK 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen kontruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NKt = \sum_{M=1}^{M} P_m q_m$$

dengan:

: nilai komponen ke-1 pada masing-masing NKtsistem dari bangunan di suatu kabupaten/kota

harga material/upah/sewa material ke-m P_m

: kuantitas/volume material/upah/sewa ke q_m

m

: jumlah material/sewa dalam komponen M

ke-1

Tahap penghitungan kedua adalah dengan menghitung Purchasing Power Parity (PPP) sistem

$$PPP_{sistem \ ijk} = \left(\prod_{l=1}^{L} \frac{NK_{k1x}}{NK_{k10}}\right)^{1/L}$$

dengan:

PPP_{sistem ijk}: purchasing power parity sistem ke-k,

bangunan ke-j, proyek ke-i

 NK_{k1x} : nilai komponen ke-1, sistem ke-k, di

kabupaten kota ke-x

: nilai komponen ke-1, sistem ke-k, di

kabupaten/kota acuan

L : jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP dengan mengunakan metode bangunan rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan \ ijk} = \left(\prod_{k=1}^{K} PPP_{sistem \ ijk}\right)^{w/2k}$$

dengan:

 $PPP_{bangunan \ ijk}$: purchasing power parity bangunan ke-j,

proyek ke-i

: jumlah sistem dalam suatu bangunan K

penghitungan keempat adalah penghitungan PPP proyek menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek \ i} = \left(\prod_{j=1}^{J} PPP_{bangunan \ ij}\right)^{1/j}$$

dengan:

PPP_{provek i}: purchasing power parity proyek ke-i

: jumlah sistem dalam suatu proyek K

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_0 = dummy \ kota \ acuan = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung kabupaten/kota menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} \left(\prod_{i=1}^{I} (PPP_{proyek i})^{w1i} \right). 100$$

dengan:

: jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

: penimbang yang berasal dari realisasi APBD

Secara garis besar proses penghitungan IKK melalui beberapa tahapan, diantaranya:

Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, a. dan diagram timbang material dari data BoO.

- Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei harga kemahalan kontruksi (SHKK) dengan diagram timbang material.
- Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara
 PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek
 dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
- Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP proyek
- e. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2021 untuk memperoleh angka IKK

3.3 IKK 2022

IKK telah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ

2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena mulai tahun 2013 penghitungan IKK itu sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan *updating* BoQ sampai tahun 2021.

IKK tahun 2022 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2021, akhir Oktober 2021, akhir Januari 2022, dan akhir April 2022. Seperti halnya IKK tahun 2021, IKK tahun 2022 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2022 adalah Kota Makassar, berubah dari Kota Semarang di tahun 2018-2020. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Pada proses penghitungan IKK tahun 2022, dilakukan penyempurnaan sewa alat berat murni

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016. Penghitungan dilakukan alat berat murni dengan sewa cara mengeluarkan biaya mobilisasi alat, biaya bahan bakar (solar), biaya pelumas, biaya operator, serta biaya perbaikan dan perawatan dari total biaya sewa alat berat. Penyempurnaan penghitungan sewa alat berat merupakan upaya yang dilakukan dalam satu , data ,

BAB IV ANALISIS IKK KABUPATEN SORONG

4.1 Profil Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang telah melahirkan 5 daerah otonom baru yaitu Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Luas wilayah Kabupaten Sorong mencapai sebesar 13.075,28 Km².

Gambar 4.
Peta Wilayah Kabupaten Sorong



Secara geografis, Kabupaten Sorong terletak pada koordinat 00° 33′ 42″ hingga 01° 35′ 29″ Lintang Selatan dan 130° 40′ 49″ hingga 132° 13′ 48″ Bujur Timur.

Sedangkan batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

Utara : Samudera Pasifik dan Selat Dampir

Selatan: Laut Seram

Timur : Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan

Barat : Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram

Jika dilihat berdasarkan topografi wilayah, maka bentuk permukaan bumi atau morfologi wilayah Kabupaten Sorong adalah dataran rendah yang dimulai dari sebelah barat dan semakin ke timur merupakan wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki ketinggian dari 0 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut.

Dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian barat dan selatan (sekitar 25 persen dari total luas wilavah Kabupaten Sorong), sedangkan pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 100 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian utara dan timur, atau sekitar 60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sorong.

Pada tahun 2022 Kabupaten Sorong memiliki jumlah penduduk sebanyak 121.963 jiwa yang tersebar di 30 kecamatan/distrik. Dengan luas wilayah sebesar ±13.075,28 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sebesar 9,33 jiwa/Km². Salah satu tujuan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah meningkatkan pemerataan persebaran penduduk. Melalui pemerataan penduduk, secara umum dapat membantu dalam usaha peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu idealnya adalah komposisi jumlah penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu wilayah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sorong Tahun 2022

No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Klaso	589	345,03	1,71
2.	Saengkeduk	551	395,74	1,39
3.	Makbon	3.239	690,06	4,69
4.	Klayili	1.176	394,32	2,98
5.	Beraur	888	540,77	1,64
6.	Bagun	430	443,61	0,97

No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	
7.	Botain	120	349,74	0,34	
8.	Klamono	5.769	492,90	11,70	
9.	Klasafet	1.011	246,45	4,10	
10.	Malabotom	1.112	443,61	2,51	
11.	Klabot	618	394,32	1,57	
12.	Buk	691	345,03	2,0	
13.	Klawak	811	591,48	1,37	
14.	Konhir	574	394,32	1,46	
15.	Hobard	360	345,03	1,04	
16.	Salawati	12.399	345,03	35,94	
17.	Mayamuk	14.433	542,19	26,61	
18.	Moisigin	3.672	443,61	8,27	
19.	Seget	4.247	443,61	9,57	
20.	Segun	1.618	443,61	3,65	
21.	Salawati Selatan	1.213	295,74	4,10	
22.	Salawati Tengah	1.530	492,90	3,10	
23.	Aimas	43.954	690,06	63,69	
24.	Mariat	17.049	542,19	31,44	
25.	Sorong	805	443,61	1,81	
26.	Sayosa	1.046	398,19	2,63	
27.	Wemak	743	395,74	1,88	
28.	Sayosa Timur	426	395,74	1,07	
29.	Maudus	489	443,61	1,10	
30.	Sunook	400	347,04	1,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2 **IKK Kabupaten Sorong**

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK secara rata-rata Nasional. Semakin tinggi IKK suatu daerah, maka biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan juga semakin besar, atau dengan kata lain kegiatan distribusi bahan bangunan/ konstruksi di daerah tersebut lebih sulit jika dibandingkan daerah lainnya. IKK yang rendah menunjukkan adanya nilai tambah suatu daerah terkait distribusi bahan bangunan/konstruksi yang berjalan baik dan kemudahan dalam membuat suatu bangunan. Adapun hasil penghitungan IKK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)					
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Fak-fak	135,83	129,89	126,32	135,74	117,96	
2.	Kaimana	124,79	121,24	123,48	118,86	116,06	
3.	Teluk Wondama	124,62	122,57	127,67	124,49	117,36	

No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)					
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4.	Teluk Bintuni	146,40	156,26	139,24	147,41	114,22	
5.	Manokwari	120,93	120,13	120,92	119,59	114,43	
6.	Sorong Selatan	124,54	129,04	128,36	138,18	118,97	
7.	Sorong	128,49	127,39	119,93	116,23	115,09	
8.	Raja Ampat	140,26	131,12	125,22	131,59	124,79	
9.	Tambrauw	140,90	129,16	128,92	128,54	130,39	
10.	Maybrat	125,43	122,63	132,47	131,92	128,63	
11.	Manokwari Selatan	133,96	146,32	130,73	130,44	132,18	
12.	Pegununga n Arfak	188,95	192,80	185,70	167,64	151,52	
13.	Kota Sorong	119,87	113,03	109,25	115,79	117,26	

Sumber: Badan Pusat Statistik

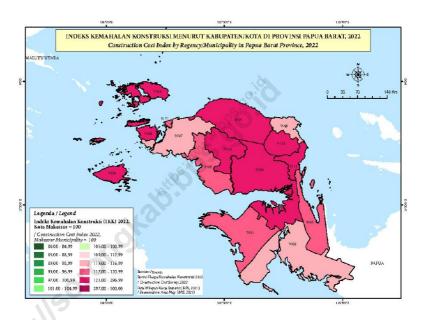
Dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 151,52; Kabupaten Manokawari Selatan sebesar 132,18; dan Kabupaten Tambrauw sebesar 130,39. Sedangkan 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu Teluk Bintuni sebesar 114,22; Kabupaten Manokwari sebesar 114,43; dan Kabupaten Sorong sebesar 115,09.

Secara umum, terjadi penurunan angka IKK Tahun 2022 pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, kecuali

untuk Kabupaten Manokwari Selatan, Tambrauw, dan Kota Sorong yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,74 poin, 1,85 poin, dan 1,47 poin. Kabupaten Sorong sendiri menempati posisi ke-3 IKK terendah di seluruh Provinsi Papua Barat sebesar 115,09. Angka ini turun an 21. sebesar 1,14 poin dibanding tahun 2021.



Gambar 6. IKK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Jarak yang dekat antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang merupakan pintu masuk barang-barang konstruksi dari luar wilayah Provinsi Papua Barat, semakin mempermudah arus masuk barang/bahan bangunan/ Kabupaten Sorong. Pada konstruksi di umumnya barang/bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Sorong berasal dari Kota Sorong, tetapi barang/bahan konstruksi tersebut juga ada yang didatangkan langsung dari luar wilayah Kabupaten Sorong dengan jalur pengiriman melalui pelabuhan Kota Sorong.

Disisi lain, Kabupaten Sorong yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik, seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah memadai sehingga arus distribusi barang-barang konstruksi dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong menjadi lancar. Lancarnya arus distribusi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dapat menekan biaya transportasi sehingga harga barang/bahan konstruksi di Kabupaten Sorong cenderung mendekati harga barang/konstruksi di Kota Sorong.

Pemakaian barang/bahan konstruksi yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sorong masih lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dan dihasilkan di Kabupaten Sorong, Bangunan konstruksi berbagai memerlukan macam ienis barang/bahan konstruksi yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan sebagainya hingga penggunaan alat berat.

Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Sorong tanpa harus didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Sorong, seperti pasir, batu dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Papua Barat. Jadi dapat dikatakan IKK Kabupaten Sorong lebih didominasi oleh barang/bahan konstruksi yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Sorong.

Nttips: IIsorongkab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022.
- Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan UU antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SORONG

Jl. Osok, Km. 18, Aimas, Kabupaten Sorong Telp (62-951) 335485 Faks (62-951) 335901

Mailbox: bps9107@bps.go.id